

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen negara secara sistematis, terstruktur dan terencana untuk menjadikan suatu keadaan atau kondisi lebih baik dari sebelumnya dengan memaksimalkan, mengelola dengan efisien, dan mempertanggungjawabkan setiap sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Di Indonesia, UUD menjadi dasar dalam upaya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan, dimana tujuan tersebut dituliskan pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pada dasarnya pembangunan selalu berorientasi pada manusia sebagai subjek dan titik pusat, dimana pembangunan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seer dan Sen (dalam Muljarijadi, 2011) menjelaskan tujuan pembangunan ialah untuk mencapai kemajuan masa depan sebagai suatu upaya menuju kondisi yang baik, hal ini melibatkan usaha untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi disparitas, menciptakan peluang kerja, meningkatkan keamanan masyarakat, dan mewujudkan kebebasan dalam berbagai aspek seperti keamanan, politik, sosial dan ekonomi. Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong kemandirian bangsa, dan memberikan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Masalah

pembangunan menjadi persoalan yang terjadi baik di negara tertinggal, berkembang bahkan negara maju. Smith dan Todaro mengemukakan harus dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai dimensi dan perubahan pada berbagai hal seperti sikap, faktor kelembagaan dan struktur, ketidakadilan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penghapusan kemiskinan absolut (Nurchahyo, 2021).

Pada proses pembangunan, Indonesia adalah negara dengan kompleksitas atau keberagaman yang tinggi baik dari suku, budaya, dan kondisi alamnya yang dimana keberagaman tersebut menciptakan perbedaan-perbedaan dalam segi kekayaan alam, sosial, ekonomi, dan karakteristik alam pada setiap wilayah. Sebagai negara dengan ribuan pulau di dalamnya secara alami memiliki perbedaan karakteristik wilayah yang tidak bisa dihindari dan menjadi konsekuensi yang logis. Pada dasarnya karakteristik wilayah memiliki pengaruh yang besar dalam pola pembangunan. Hal ini menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia.

Kenyataannya, sering kali kemajuan ekonomi hanya terkonsentrasi di satu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga tidak dapat terlepas dari adanya ketimpangan, oleh karena itu ketimpangan sudah menjadi bagian dari proses pembangunan dimana keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah tidak berarti bahwa tidak terjadi adanya ketimpangan di daerah tersebut. Williamson (dalam Kiton, 2019) menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah, baik antara daerah dan pusat maupun antar daerah adalah hal yang lazim karena perbedaan kekayaan alam dan tahap permulaan pembangunan yang berbeda di setiap daerah. (Sjafrizal, 2018) juga berpendapat bahwa terdapat

beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan pembangunan yakni diantaranya kondisi demografi, konsentrasi kegiatan ekonomi, perbedaan kandungan kekayaan alam, alokasi dana pembangunan antar wilayah dan kurang lancarnya mobilitas.

Dilansir dari <https://databoks.katadata.co.id> Jawa Timur masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia dimana pada tahun 2022 menempati posisi ke 10 sedangkan tahun 2023 naik pada posisi ke 5 dilihat dari Indeks Gini berdasarkan BPS yang mencapai angka 0.39 poin. Indeks Gini merupakan alat ukur atau parameter untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dengan tingginya nilai Indeks Gini mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata (Janah, 2022). Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut kemudian berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Ihsani & Rohman, 2022). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menjadi Indikator makro yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Dimana berdasarkan berita yang dilansir dari <https://jatimprov.go.id> Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur relatif tinggi sehingga menjadikannya penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa yakni sebesar 24,99 persen setelah DKI Jakarta. Akan tetapi, tingginya capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi setiap wilayah di Jawa Timur, namun pada kenyatannya pertumbuhan ekonomi masih cenderung belum merata pada semua wilayah.

BPS Jawa Timur menunjukkan adanya perbedaan capaian pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur. Pada tahun 2022 tercatat presentase pertumbuhan ekonomi paling tinggi ialah Kabupaten Tuban dengan capaian sebesar 8.88%, sedangkan wilayah dengan capaian pertumbuhan ekonomi paling

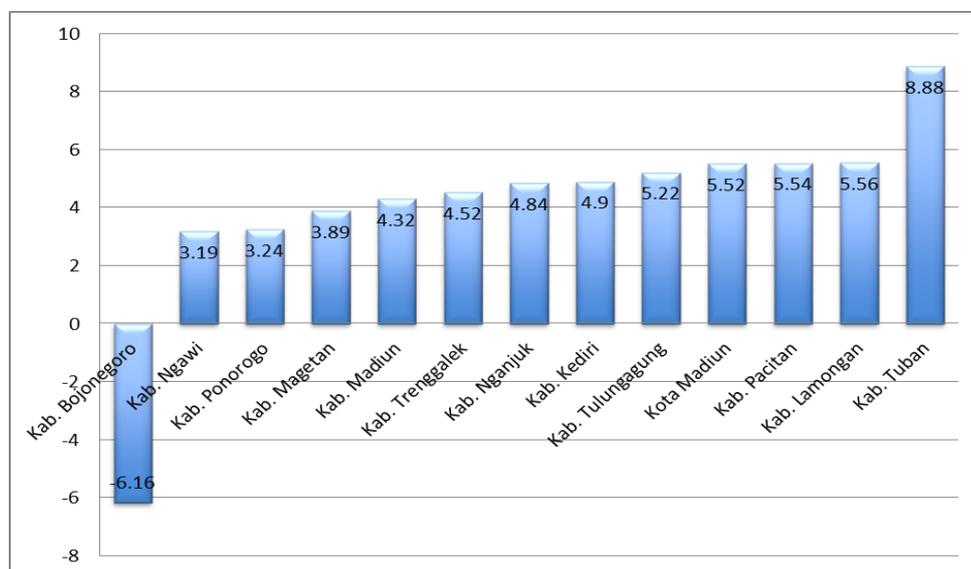
rendah ialah Kabupaten Bojonegoro sebesar -6,16%. Perbedaan capaian pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah menggambarkan pembangunan yang belum merata di Provinsi Jawa Timur, dimana ada wilayah yang cenderung terbelakang dan maju. Kondisi tersebut didorong oleh perbedaan kekayaan alam maupun kondisi wilayah yang berbeda sehingga wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah dapat berkesempatan untuk memanfaatkan potensi daerahnya yang kemudian mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah, namun tidak semua wilayah memiliki kesempatan yang sama.

Perbedaan potensi pada masing-masing kabupaten/kota tersebut kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah No.4/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah No.2/2006. Dalam peraturan tersebut Jawa Timur dibagi menjadi 9 SWP diantaranya SWP I Gerbangkertosusilo Plus, SWP II Malang Raya, SWP III Madiun dan sekitarnya, SWP IV Kediri dan sekitarnya, SWP V Probolinggo-Lumajang, SWP VI Blitar, SWP VII Jember dan sekitarnya, SWP VIII Banyuwangi serta SWP IX Madura dan Kepulauan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap daerah. Pembagian wilayah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi karakteristik wilayah, potensi ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih merata, terarah dan berkelanjutan.

Salah satu dari 9 SWP tersebut ialah Santuan Wilayah Pembangunan (SWP) III Madiun dan sekitarnya yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan yang memiliki sektor basis yakni sektor pertanian, perdagangan eceran

dan besar, industri pengolahan, jasa pendidikan dan jasa pariwisata. Berdasarkan berita yang dilansir dari <https://www.goodnewsindonesia.id> Jawa Timur dibagi menjadi empat Tlatah yakni Mataraman, Arek, Madura Pulau dan Pandalungan yang disebabkan oleh 7 unsur diantaranya sistem pengetahuan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem ekonomi dan lainnya. Dari pembagian tersebut daerah-daerah SWP III masuk dalam tlatah mataraman yang berada di bagian barat Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah yang identik dengan isu ketertinggalan, kemiskinan serta keterbatasan infrastruktur. Dimana menurut publikasi BPS capaian pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah SWP III tersebut cenderung rendah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Pada Tahun 2022 tercatat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan, Ponorogo, Ngawi dan Madiun masuk dalam 10 terendah se Jawa Timur sedangkan 2 wilayah lainnya yakni Kota Madiun dan Kabupaten

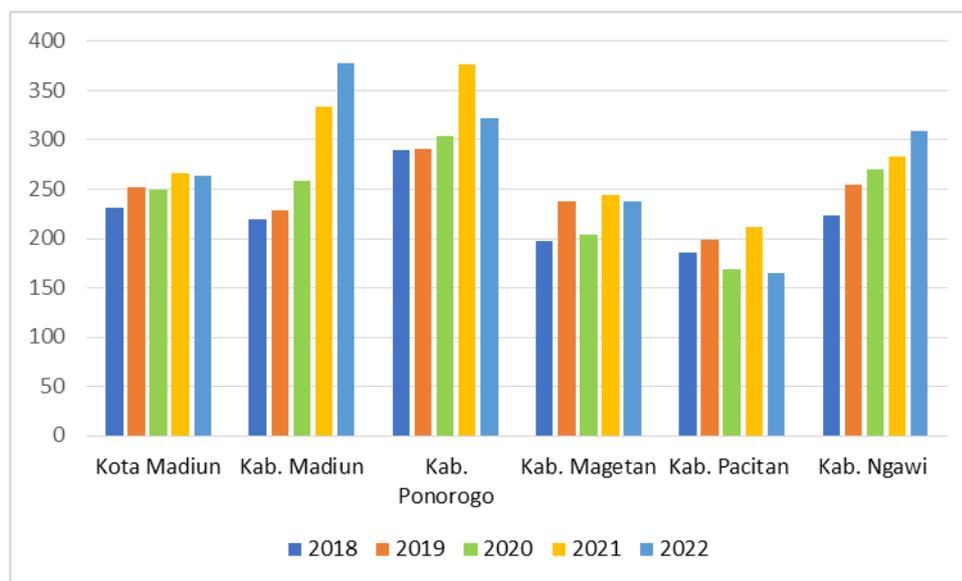
Pacitan mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya namun masih lebih rendah dibandingkan wilayah lain di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Rendahnya capaian pembangunan di wilayah SWP III dimana pada Tahun 2022 Kabupaten Ngawi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,19%, Kabupaten Ponorogo 3,24%, Kabupaten Magetan 3,89%, dan Kabupaten Madiun 4,32% kemudian Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan masing-masing sebesar 5,52% dan 5,54%. Rendahnya capaian pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi pada daerah-daerah tersebut masih tergolong rendah, hal ini tentunya akan berdampak dan mengindikasikan terjadinya ketidakmerataan atau ketimpangan antar wilayah.

Dalam pembangunan, peran pemerintah dapat tercermin dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah bentuk dari implementasi dari ide desentralisasi (Badrudin, 2017). Dimana desentralisasi merujuk pada pemberian kuasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, melalui otonomi daerah pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengelola keuangannya termasuk dalam penggalan pendapatan dan menentukan prioritas pembangunan dengan harapan dapat meratakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan adanya kemampuan keuangan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi ekonominya guna mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan dan inisiatif pembangunan. Pendapatan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan potensi wilayah dikenal

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengacu pada pendapatan yang dihimpun berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.

Grafik 1. 2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)



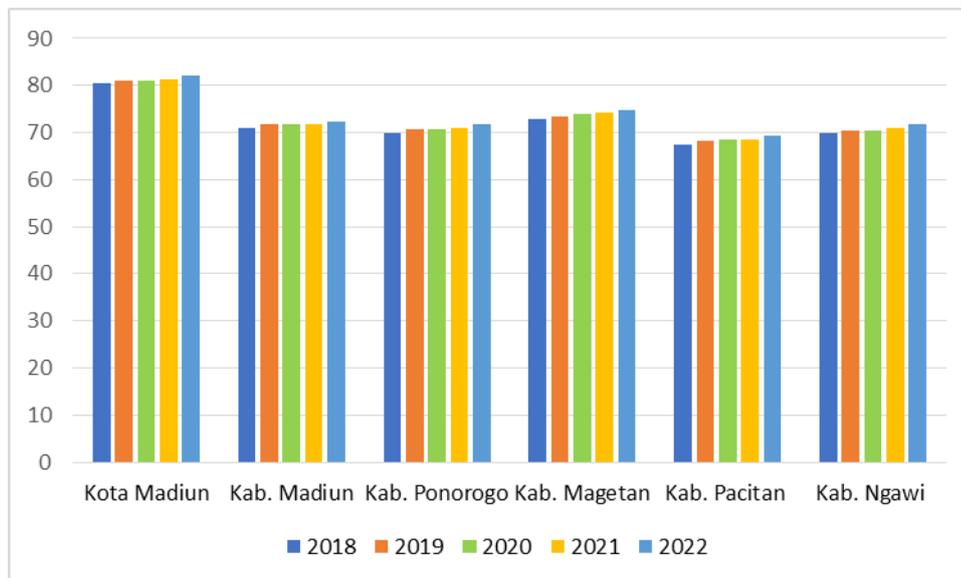
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, 2022 (diolah)

Grafik 1.2, menerangkan bahwa PAD pada 6 SWP III berbeda-beda dan memiliki tren yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perbedaan ini menggambarkan bahwa tidak semua daerah mampu meningkatkan perekonomiannya serta terdapat faktor-faktor lain pada setiap daerah yang mempengaruhi PAD nya. PAD tertinggi tahun 2022 dimiliki oleh Kota Madiun sebesar 377.43 milyar sedangkan PAD terendah dimiliki oleh Kabupaten Pacitan sebesar 165.24 milyar, dengan adanya kondisi perbedaan yang terjadi tersebut mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

Faktor lain, demografis menjadi salah satu faktor penting dalam produktivitas masyarakat dimana untuk mengukur kualitas dari SDM suatu daerah digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Report*

1990 juga memperkenalkan IPM sebagai indeks komposit dalam mengukur capaian dalam aspek dasar pembangunan manusia.

Grafik 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



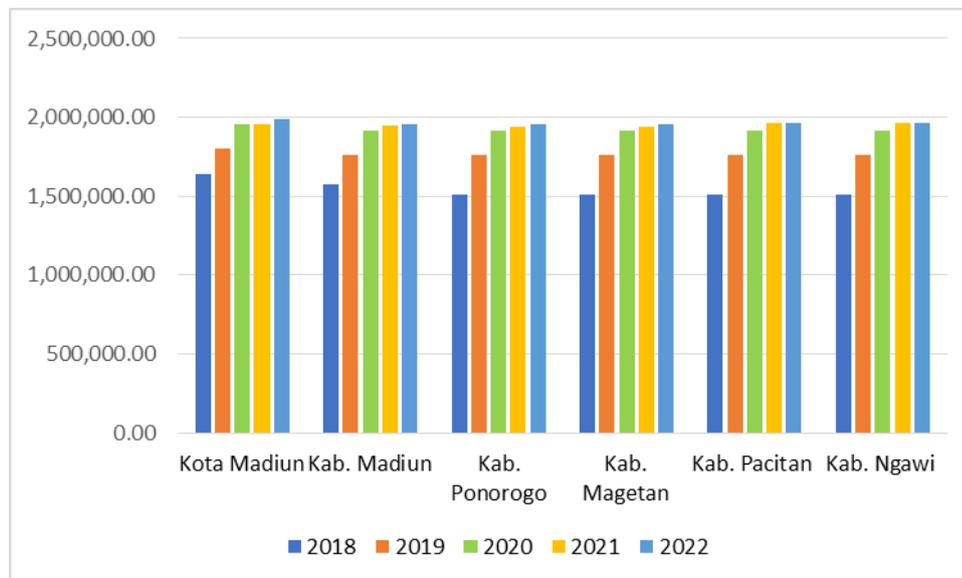
Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Grafik 1.3, menjelaskan IPM daerah-daerah SWP III berbeda masing-masing daerah. Dari grafik tersebut didapatkan bahwa Kota Madiun memiliki IPM paling tinggi pada setiap tahunnya dibandingkan dengan daerah lainnya dimana pada tahun 2022 Kota Madiun berhasil mencapai IPM sebesar 82.01 poin. Sedangkan daerah yang memiliki IPM paling rendah pada tahun yang sama yakni Kabupaten Pacitan sebesar 69.37 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas masyarakat pada setiap daerah yang kemudian dapat mempengaruhi berbagai aspek, dengan adanya kondisi perbedaan yang terjadi tersebut mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

Upah Minimum Kabupaten mengacu pada standart minimum upah pegawai, karyawan atau buruh yang ditentukan oleh setiap daerah. Upah minimum bisa ditetapkan pada tingkat subsektoral, sektoral regional dan regional

sebagaimana telah di atur dalam PP No. 8/1981. Namun, saat ini setiap daerah hanya memiliki upah minimum regional.

Grafik 1. 4
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Grafik 1.4, menjelaskan tingkat UMK daerah-daerah SWP III berbeda-beda setiap tahunnya. Dari grafik di atas menunjukkan UMK paling tinggi Tahun 2022 dimiliki oleh Kota Madiun yaitu sebesar 1.991.105,79 rupiah, sedangkan UMK paling rendah pada tahun yang sama dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 1.954.281,32 rupiah. Pada dasarnya UMK berpengaruh pada kemampuan konsumsi masyarakat yang kemudian berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan, oleh karena itu dengan adanya perbedaan UMK pada tiap wilayah ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III Jawa Timur ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas didapatkan rumusan penelitian dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur ?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Ketimpangan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan III Jawa Timur.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yakni menggunakan analisis kuantitatif dengan data panel pada SWP III Jawa Timur. Data didapatkan melalui publikasi Badan Pusat Statistik dan Laporan Anggaran APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan daerah-daerah SWP III Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2016-2022. Penelitian menggunakan variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sedangkan Ketimpangan Pembangunan sebagai variabel dependen.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, menjadi pembelajaran serta langkah awal penerapan dari ilmu pengetahuan yang didapatkan serta sebagai pengalaman yang kemudian dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah Daerah, menjadi masukan dan sumber informasi serta bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan sebagai langkah awal pembangunan daerah di SWP III Jawa Timur.
3. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi sumber referensi dan rujukan untuk penelitian berikutnya.